

KESENYAPAN NARASI KOLONIALISME DALAM NOVEL-NOVEL SUNDA RENTANG 1914–1940: WACANA MENINGAT DAN MELUPAKAN
(The Silent of Colonialism Narratives in Sundanese Novels Circa 1914–1940: Memory Discourse about Remembering and Forgetting)

Asep Yusup Hidayat, Lina Meilinawati Rahayu, & Teddi Muhtadin
Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21 Jatinangor Sumedang, Indonesia
Pos-el: yusup_hidayat@yahoo.com

(Diterima: 21 Desember 2021; Direvisi: 1 November 2022; Disetujui: 14 Maret 2023)

Abstract

In the early 20th century circa 1914–1940 were Sundanese novels almost "silent" from the colonialism narratives. This condition shows that memories were forgotten, suppressed, ignored, or even omitted in literary works because of the domination of the Dutch East Indies. However, the colonial traces can be revealed through how the narratives are constructed and presented. Through their works, the authors (from the middle class and educated) told about social reality and themselves in the challenges of social change in the early 20th century. This paper aims to reveal the memory selection process of Sundanese novelists in the early 20th century in producing their works under the dominant forces influences: feudal and colonial. The data analysis techniques were as follows, (a) data instruments: narrative tools, special expressions, projection, and construction (b) describing the data instruments, (c) interpreting the data, (d) conclusions. The analysis results are: (1) the authors positioning (as teachers, natives, and employees of the Balai Pustaka) had an affects on the memories selections that were used to constructing narratives about domination and power, (2) the narratives of colonialism memories in five novels are built in three ways: suppressed, diverted, and even erased, (3) The voices behind the colonialism-narratives silent are expressed through the metaphorical traces of power, the pre-colonial and colonial memories as background, and indigenous marginal discourse.

Keywords: narration, colonialism, remembering, forgetting, Sundanese novel

Abstrak

Pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1914–1940 novel-novel Sunda nyaris "diam" dari narasi kolonialisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa ingatan dilupakan, ditekan, diabaikan, atau bahkan dihilangkan dalam karya sastra karena dominasi Hindia Belanda. Namun, jejak kolonial dapat terungkap melalui bagaimana narasi dibangun dan disajikan. Melalui karya-karyanya, para pengarang (dari kelas menengah dan terpelajar) bercerita tentang realitas sosial dan diri mereka sendiri dalam tantangan perubahan sosial di awal abad ke-20. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap proses seleksi ingatan para novelis Sunda di awal abad 20 dalam menghasilkan karya-karyanya di bawah pengaruh kekuatan dominan: feodal dan kolonial. Teknik analisis data adalah sebagai berikut, (a) instrumen data: alat naratif, ungkapan khusus, proyeksi, dan konstruksi (b) mendeskripsikan instrumen data, (c) menafsirkan data, (d) kesimpulan. Hasil analisis adalah: (1) positioning pengarang (sebagai guru, pribumi, dan pegawai Balai Pustaka) berpengaruh terhadap pemilihan memori yang digunakan untuk mengkonstruksi narasi tentang dominasi dan kekuasaan, (2) narasi memori kolonialisme dalam lima novel dibangun melalui tiga cara: ditekan, dialihkan, dan bahkan dihapus, (3) suara-suara di balik narasi-narasi kolonialisme diekspresikan melalui jejak metaforis kekuasaan, kenangan pra-kolonial dan kolonial sebagai latar, dan marginalisasi pribumi.

Kata-kata kunci: narasi, kolonialisme, mengingat, melupakan, novel Sunda

DOI: 10.26499/jk.v19i1.4402

How to cite: Hidayat, A.Y. dkk. (2023). Kesenyanan Narasi Kolonialisme dalam Novel-Novel Sunda Rentang 1914–1940: Wacana Mengingat dan Melupakan. *Kandai*, 19(1), 108–124 (DOI: 10.26499/jk.v19i1.4402)

PENDAHULUAN

Lima novel Sunda terbitan masa kolonial Hindia Belanda awal abad ke-20 dikarang oleh kaum pribumi yang terdidik dan sama-sama bekerja di penerbitan pemerintah Hindia Belanda: *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* (kemudian dikenal sebagai Balai Pustaka). Kelima novel tersebut diterbitkan Balai Pustaka. *Baruang ka nu Ngarora* “Racun bagi Muda-Mudi” (novel Sunda pertama, 1914) dikarang D.K. Ardiwinata, *Mantri Jero* (1928) dan *Pangéran Kornél* (1930) dikarang R. Méméd Sastrahadiprawira, *Burak Siluman* (1932) dan *Lain Éta* ‘Bukan Itu’ (1934) dikarang Moh. Ambri.

D.K. Ardiwinata (Deenik, 1929: 124–137) dalam buku kenangan 50 tahun berdirinya OSVIA, menyatakan diri telah mengabdikan kepada pemerintahan Hindia Belanda selama 36 tahun; bekerja di OSVIA selama 15 tahun, kandidat guru 13 tahun, guru di Karangpamulangan 1,5 tahun, guru di *Sakola Menak* 15 tahun, dan di Balai Pustaka 6,5 tahun. Ia pernah mendapatkan penghargaan “Kanduruan” untuk jasanya di bidang pendidikan dan budaya. Ia pun mendapat penghargaan dari pemerintah Belanda berupa *Ridder in de orde van Oranje Nassau*. Ia merupakan pendiri Paguyuban Pasundan.

R. Méméd Sastrahadiprawira (Yetty Kusmiyati, 1979: 1–3) sebagai anak ningrat, Méméd mula-mula disekolahkan di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), sekolah bagi kaum bangsawan dan orang kaya. setamat HIS, ia masuk ke *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) yang juga dikenal sebagai *Sakola Menak* dan khusus disediakan untuk calon pejabat pangreh praja di Hindia Belanda. Untuk itu, sebelumnya Méméd harus belajar bahasa Belanda di sekolah swasta. Setelah tamat belajar di OSVIA, Méméd

diangkat menjadi *Gouvernement Ambtenaar voor Inlandsche Bestuur* (GAIB) ‘Pejabat Pemerintah dari Kalangan Pribumi’, diperbantukan kepada Wedana Ciranjang Garut. Tahun 1921 diperbantukan kepada Bupati Bandung. Sejak tahun 1922 menjadi mantri polisi di beberapa tempat; menjadi mantri Kabupaten Bandung. Pada tahun 1925 Méméd diangkat menjadi camat Bojongloa Bandung. Tahun 1926 menjadi Camat diperbantukan di Kabupaten Bandung. Saat menjabat di pemerintahan, ia menulis mengenai keadaan Kabupaten Bandung terkait penduduk, adat kebiasaan, dan perkembangan kotanya, serta menulis sebuah sketsa yang bernilai sejarah mengenai perubahan pemerintahan di Priangan dan Hindia Belanda. Méméd mengenal aturan-aturan pemerintahan, berbagai pajak, *preangerstelsel*, dan hak-hak para bupati di Hindia terutama di Priangan. Dengan surat angkatan *Hoofdambtenaar Volkslectuur* Nomor 16 tanggal 11 Juli 1928, Méméd diangkat menjadi pegawai Balai Pustaka. Mula-mula jabatannya sebagai penulis utama (*Hoofdredacteur 1 klas*) kemudian sebagai ahli bahasa (*adjunct taalkundige*) yang merupakan jabatan tertinggi di bagian sidang pengarang Balai Pustaka. Semasa bekerja di Balai Pustaka Méméd banyak menulis bukan saja karangan berbahasa Sunda, tetapi juga karangan berbahasa Indonesia dan Belanda. Méméd pun aktif dalam menghadapi gejolak nasionalisme. Ia menjadi Wakil Ketua *Jong Java* Cabang Bandung yang pada masa itu terdiri atas 17 orang anggota biasa dan 11 orang anggota luar biasa. *Jong Java* tidak mengutamakan politik, tujuannya terutama mempersiapkan pemuda pelajar untuk mencapai kemajuan, bergerak di bidang-bidang kepanduan, olah raga, dan kesenian.

Moh. Ambri (Abdurrachman, dkk, 1984: 30–31) menjadi kandidat guru HIS di Sumedang tahun 1911 kemudian dipindahkan ke Tasikmalaya tahun 1917. Pada tahun 1918 ia dikeluarkan dari HIS di Tasikmalaya oleh pemerintah Hindia Belanda karena dituduh terlibat dalam aksi masa yang menentang penjajahan Belanda yang dilakukan oleh SIB (Sarikat Islam *Afdeling B*). Aksi tersebut menentang gerakan pengumpulan padi yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Ia kembali menjadi guru HIS di Sumedang pada tahun 1919. Pada tahun 1922 ia menjadi kepala Sekolah Tingkat Lanjut di Purwakarta. Pada tahun 1926 ia dipindahkan kembali ke Bandung dan diangkat menjadi Mantri Guru di sekolah di Cicendo. Pada tahun 1928 ia kembali ke Purwakarta menjadi guru di *Normaalschool*. Dari Purwakarta ia pindah ke Jakarta. Di Jakarta ia diangkat menjadi ketua redaktur Balai Pustaka. Dia bekerja di Balai Pustaka selama 5 tahun hingga akhir hayatnya. Semasa kecil ia dijadikan sebagai anak angkat oleh keluarga L.J.F. Gerritse di mana ibu Moh. Ambri bekerja sebagai pembantu di keluarga tersebut. Gerritse bekerja di *Commissie voor het Beheer der Begraafplaatsen voor Lijken van Europeanen en met Dezen Gelijkgestelden* ‘Komisi Pengurus Pemakaman Orang Eropa dan Orang Asing Lainnya yang Setara’.

Moh. Ambri (Abdurrachman, dkk., 1984:21–36) selain dikenal sebagai seorang sastrawan dan aktif di organisasi Paguyuban Pasundan, juga dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu kebatinan (Abdurrachman, 1984: 30–31). Pengakuan terhadap Moh. Ambri sebagai seorang sastrawan Sunda, selain diberikan oleh PPSS (Paguyuban Pangerang Sastra Sunda) dengan Hadiah sastra tahunan yang disebut sebagai Piagam Ambri sejak tahun 1966, juga Pemerintah Kabupaten Sumedang pada

tahun 1964 pernah memberikan tanda penghargaan sebagai tokoh sastra atau budaya yang ternama yang berasal dari Sumedang (Abdurrachman, 1984: 35).

Beberapa surat yang dibuatnya kepada Muhammad Husna, teman Moh. Ambri yang berada di Kalimantan, cukup penting sebagai sumber petunjuk tentang pemikiran-pemikiran Ambri tentang budaya feodal, budaya kolonial, dan ilmu kebatinannya. Rosidi berhasil mengumpulkan beberapa surat Ambri dan diterbitkan dalam *Pancakaki* (Rosidi, 1996: 264–316). Surat-surat Ambri tersebut Rosidi tempatkan di subbab terakhir dari 25 subbab yang disusunnya. Sebagian besar suratnya secara konsisten berbicara tentang pengalaman-pengalaman batiniahnya yang berhubungan dengan cara Ambri menafsir kehidupan, baik yang bersumber dari pengalaman kesehariannya semasa ia menjalankan aktivitasnya sebagai pegawai pemerintah, hasrat-hasratnya yang berhubungan dengan para leluhurnya, penempatan dirinya sebagai “tempat bertanya” orang-orang yang berada di sekitarnya, atau bahkan mimpi-mimpi yang sering ia sampaikan disertai tafsir-tafsirnya.

Kelima novel tersebut menjadi penting ketika para penulisnya hidup di lingkungan pemerintah Hindia Belanda sekaligus berada dibawah aturan ketat pemerintah Hindia Belanda. Kelima novel tersebut sangat signifikan untuk menunjukkan bagaimana kemampuan pengarang menghasilkan karya-karyanya di bawah kontrol ketat penguasa Hindia Belanda; bagaimana para pengarang, seterbatis apapun, masih berpeluang menyuarakan kehendak bebasnya sebagai kaum pribumi dari belenggu kolonialisme.

Baruang ka nu Ngarora terbit pada masa awal Perang Dunia I. *Mantri Jero*, *Pangeran Kornél*, *Burak Siluman*, dan *Lain Eta*, terbit pada rentang tahun 1928

sampai dengan 1934 ketika dunia sedang menghadapi puncak krisis ekonomi global. Belanda dan jajahannya terkena imbas krisis tersebut. Pada rentang waktu tersebut kaum pribumi Hindia Belanda menghadapi krisis berupa tekanan terkuat dari pemerintah Hindia Belanda. Yamamoto (2011: 295–296) menyatakan bahwa periode 30-an merupakan titik tertinggi penindasan pemerintah Hindia Belanda terhadap organisasi politik dan keagamaan masyarakat adat. Yamamoto (2011: 261) menunjukkan bahwa periode represif negara Hindia ini telah dikaitkan dengan kurangnya kebebasan berbicara dan berekspresi di bawah pemerintahan kolonial. Aturan penyensoran Hindia Belanda hampir tidak dapat diandalkan. Pembatasan kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara hampir sama buruknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) (Casutto, Is. H. dan Soeprapto, 1931) menunjukkan bagaimana otoritas Hindia Belanda secara ketat mengatur kaum pribumi. Sejumlah ekspresi yang dilarang pihak otoritas Hindia Belanda tercantum dalam pasal-pasal kejahatan, yaitu (1) kejahatan terhadap keamanan negara, (2) kejahatan terhadap martabat kerajaan dan bertentangan dengan martabat Gubernur Jenderal, (3) kejahatan terhadap negara sahabat dan melawan kepala dan perwakilan negara sahabat, (4) pelanggaran terhadap tugas negara dan hak negara, (5) kejahatan terhadap ketertiban umum, (6) perkelahian, dan (7) kejahatan yang dilakukan masyarakat umum terhadap keselamatan orang atau barang suka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi kaum Hindia Belanda tersebut dilengkapi dengan bagian terjemahan dalam bahasa Melayu yang dikerjakan oleh Raden Mas Soeprapto. Kitab tersebut memuat 3 bagian utama; buku pertama memuat

ketentuan umum (*Algemene bepalingen*) yang terdiri atas 9 bab; buku kedua memuat pasal-pasal kejahatan (*Misdrijven*) yang terdiri atas 7 bab; buku ketiga memuat pasal pelanggaran (*Overtredingen*) yang terdiri atas 9 bagian. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa para pengarang novel-novel tersebut menyadari konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya jika mereka melakukan kesalahan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Dalam aturan Balai Pustaka karya-karya mereka ditujukan untuk proses pembelajaran dalam menyambut kebaruan. Novel-novel mereka telah dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, tujuan utamanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang telah diprogramkan: menciptakan ketertiban umum. Ekspresi budaya juga diatur secara formal dengan dikeluarkannya UU Pers.

Menjadi dilema ketika para pengarang lahir melalui didikan pemerintah Hindia Belanda di awal abad ke-20. Di satu sisi, mereka adalah pegawai (sebagai redaktur di Balai Pustaka) pemerintah Hindia Belanda yang harus mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam melakukan ketertiban umum. Di sisi lain, mereka juga merupakan bagian dari kaum pribumi yang akhirnya berkesadaran untuk berjuang dan membebaskan diri dari kekuasaan Hindia Belanda dalam praktik kolonialismenya melalui perjuangan mereka. Dalam konteks ini, novel-novel karya mereka adalah media ekspresi yang perlu ditafsir terkait perjuangan mereka. Namun demikian, apakah istilah kolonialisme mengakar kuat dalam pengetahuan dan kesadaran pada ketiga pengarang tersebut?

Pengetahuan mereka tentang wilayah yang dikuasai oleh bangsa asing

merupakan bagian awal yang dapat dikaitkan dengan kapasitas mereka untuk memilih dan mengolah realitas itu untuk karya-karya mereka. Misalnya, *Baruangka nu Ngarora* merupakan salah satu representasi tradisi Balai Pustaka. Novel tersebut dianggap sangat "jauh" dari narasi kolonialisme jika dimaknai melalui semangat era pembebasan.

Ardiwinata telah dibesarkan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika ia sedang menulis novelnya. Ia pernah menjadi guru dan pemimpin redaksi divisi bahasa dan sastra Sunda di Balai Pustaka dari tahun 1916 hingga 1922. Karya nonfiksinya semakin menunjukkan betapa semangatnya ia dalam melestarikan dan menjunjung tinggi kejayaan, termasuk kehormatan Kerajaan Belanda. (lihat hasil terjemahannya Konstitusi Belanda, *Mim Pitu*, Pemerintahan Netherland dengan Hindia; tulisannya tentang pengajaran untuk bumiputra, dsb.). Dalam novelnya, ia lebih antusias mewacanakan kemurnian kaum bangsawan. Di dalam novel tersebut, kaum kolonial dihadirkan sesaat saja sebagai pelengkap suasana sore hari yang indah dan layak dinikmati bersama. Pergaulan pribumi dengan bangsa asing (Arab, Belanda, dan Cina) hanya ditunjukkan untuk mempertegas kaum bangsawan yang diuntungkan oleh kedudukan kelasnya dalam kemudahan akses bergaul dengan nonpribumi.

Pengarang lainnya yang melahirkan novel pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda awal abad ke-20 adalah R. Méméd Sastrahadiprawira. Ia menghasilkan novel berjudul *Mantri Jero* (1928) dan *Pangéran Kornél* (1930). *Mantri Jero* menggunakan latar abad ke-17. Narasi novel *Mantri Jero* didominasi oleh perspektif pra-kolonial yang lebih mengangkat isu pemerintahan tradisional. Kekuasaan dan perjuangan mengembalikan harkat dan martabat bangsawan menjadi isu utama yang

dipadukan dengan tabu dan perang yang berkecamuk dengan kerajaan Mataram. Sementara itu, novel *Pangéran Kornél* menggunakan latar abad ke-19 hingga awal abad ke-20; sedikit menyebutkan kekuatan Hindia Belanda terhadap perubahan dan perjuangan kepemimpinan di Sumedang. Masalah utama yang diangkat dalam novel ini adalah pemeliharaan garis keturunan murni.

Méméd juga dibesarkan oleh didikan pemerintah Hindia Belanda. Dia menunjukkan jarak dari kehadiran kolonial sebagai kenyataan dalam karya-karyanya. Namun, persoalan kekuasaan dalam *Mantri Jero* dan *Pangéran Kornél* merupakan celah yang masih harus ditafsir. Méméd telah menggunakan narasi-narasi "senyap" tentang kolonialisme sebagai realitas yang ia alihkan menjadi narasi-narasi kekuatan lokal dengan pilihan *mnemonic*-nya. Méméd juga merupakan bagian dari Balai Pustaka. Ia menjabat sebagai ahli bahasa di bagian pengarang Balai Pustaka dari tahun 1928 sampai dengan 1932.

Burak Siluman (1932) dan *Lain Éta* (1934) adalah dua novel diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karya-karya Moh. Ambri tersebut juga penting dalam memetakan bayang-bayang realitas kolonialisme. Ambri menempatkan jarak yang cukup jauh antara narasi kolonialisme, mengingat *Burak Siluman* lebih didominasi oleh isu mistis tradisional meskipun di akhir cerita narator mempertanyakan isu mistis dari perspektif rasional. Sementara itu, *Lain Éta* lebih didominasi oleh wacana kelas sosial di mana narasi feodalisme tentang kemurnian kelas bersaing memperebutkan tempat dengan narasi bangsawan berbalut ajaran Islam dan narasi kemajuan yang dibawa oleh peradaban Barat.

Baik *Burak Siluman* maupun *Lain Éta* memberikan celah yang perlu diatasi

dengan menghubungkan Ambri sebagai pengarang yang dibesarkan melalui pendidikan Belanda, bekerja sebagai guru, dan menghabiskan akhir hayatnya dengan mengabdikan di Balai Pustaka pada divisi bahasa dan sastra Sunda dari 1931 hingga 1936.

Kelima novel tersebut seolah menjadi paradoks jika dikaitkan dengan masa kelahirannya. *Baruang ka nu Ngarora* (1914) lahir ketika Belanda dan jajahannya (Hindia Belanda) menghadapi Perang Dunia I. *Mantri Jero* (1928), *Pangéran Kornél* (1930), *Burak Siluman* (1932) dan *Lain Eta* (1934) adalah novel-novel yang lahir pada masa “bersiap” bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan menjelang Perang Dunia II. “Kesenyanan” ketiga pengarang menarasikan kolonialisme dalam kelima novel tersebut dapat dianggap sebagai dampak paling relevan dari ketatnya regulasi pers, termasuk penerbitan karya fiksi yang dihasilkan oleh pengarang pribumi.

Tentu saja jika dilihat dari sisi penguasa, aturan tegas ini dimaksudkan untuk kepentingan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Aturan tersebut ditujukan atas nama ketertiban umum dengan menekan segala resiko dari ekspresi kaum pribumi yang tidak terkendali bahkan dianggap mengancam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang pengarang yang menghasilkan karya-karyanya di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, maka “narasi senyap” terkait kolonialisme tidak cukup dimaknai hanya sebagai kelemahan pengarang dalam menyuarakan kolonialisme sebagai sebuah kenyataan melainkan sebaliknya.

Ada kemampuan pengarang untuk menyembunyikan realitas dan menyajikannya dengan cara lain. Kondisi “senyap” masih bisa dianggap sebagai suara yang tidak terkatakan yang dapat

dibuktikan dengan seberapa besar tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur ekspresi pada pengarang sehingga “diam” adalah pilihan terbaik bagi mereka. Bagaimana itu harus dilihat dengan kekuatan penulis dalam menahan “suara keras” mereka dalam berbagai kepentingan yang ingin mereka capai, baik kepentingan menjalani kehidupan baru dalam semangat modernitas yang dibawa oleh pemerintah Belanda maupun kepentingan mempertahankan “akal sehat” sebagai pribumi atas perasaan tertindas dan kehendak bebas. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditelusuri melalui novel sebagai teks yang mengonstruksi dan menyajikannya dengan memilih narasi “senyap” sebagai cara lain untuk menampilkan berita besar tentang kekuasaan dan penindasan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini membahas tentang mengingat dan melupakan atas narasi kolonialisme dalam novel-novel Sunda di awal abad ke-20. Wacana tersebut terkait dengan tempat lahirnya novel-novel mereka dalam latar sosial, politik, dan budaya di Hindia Belanda. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri dan memahami pemilihan ingatan (*mnemonic selection*) yang terdapat dalam kelima novel Sunda tersebut. Pelacakan dan pemahaman pemilihan memori dapat dicari dengan pertanyaan pokok: (1) apa yang harus diingat dan dilupakan, (2) pilihan memori mana yang termasuk dalam batas aman bila dihubungkan dengan kontrol pemerintah Hindia Belanda, dan (3) apa saja yang dilupakan dan masih meninggalkan bekas-bekas ingatan berdasarkan pertimbangan bahwa lupa itu belum sepenuhnya hilang.

LANDASAN TEORI

Jika sebuah novel merupakan alat budaya, maka pendapat Wertsch menjadi

relevan terkait dengan fungsi naratif yang dijalankan di dalamnya. Wertsch (2004: 53–75) menyatakan bahwa narasi adalah sarana untuk mengingat dan hasil interpretasinya dapat diakses oleh publik. Menggunakan alat budaya seperti narasi akan memungkinkan orang untuk membawa pengalaman ke dalam pemahaman. Narasi adalah salah satu dari sedikit instrumen yang berbeda untuk mewakili latar, aktor, dan peristiwa. Wertsch (2004:61) sependapat dengan Barlett (1995: 44) yang beranggapan bahwa seseorang dapat “berbicara” tentang setiap reaksi kognitifnya (memahami, mengingat, membayangkan, berpikir, dan menalar) sebagai upaya untuk menemukan makna. Upaya ini didasarkan pada "kecenderungan yang dibawa subjek" ke dalam situasi yang harus dihadapinya. Kecenderungan dalam skema ini digunakan sedemikian rupa untuk membuat reaksi subjek 'paling mudah', paling tidak menyenangkan, atau tercepat dan paling tidak terhalang pada saat memungkinkan untuk bereaksi. Wertsch juga menekankan hubungan naratif dengan ingatan publik. Mengutip Bodnar, Wertsch (2004: 33) mengatakan bahwa memori publik idealnya dibentuk dalam ruang publik sejalan dengan proses komunikasinya, termasuk di dalamnya terkait kekuasaan.

Terkait studi memori, Wertsch (2004:40) menyimpulkan bahwa studi memori kolektif cenderung menganggap bahwa mengingat adalah proses yang sangat diperebutkan dan dinegosiasikan di ruang publik dan didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan masa lalu yang dapat digunakan. Menurut Eglitis dan Kelso (2018: 3), memori publik bukanlah masa lalu yang akurat karena ada narasi dominan yang melindungi *status quo* yang berfungsi untuk melegitimasi tatanan sosial yang ada untuk diantisipasi. Mengacu pada pendapat Bronsław Malinowski tentang

narasi mitis, Eglitis & Kelso (2018: 4) berpendapat bahwa mitos adalah cerita dengan fungsi sosial; Mitos tidak bisa menjadi sejarah yang tidak memihak, karena selalu dibuat *ad hoc* untuk memenuhi fungsi sosiologis tertentu, untuk memuliakan kelompok tertentu, atau untuk membenarkan status anomali.

Mitos menurut Eglitis, dan Kelso (2018: 8) berfungsi untuk menutupi inkonsistensi tertentu yang diciptakan oleh peristiwa sejarah, bukan untuk merekam peristiwa dengan baik. Eglitis dan Kelso (2018: 10) menggambarkan mitos 'pahlawan hantu'. Menurutnya, jika "pahlawan hantu" memperkuat posisi dominan beberapa kelompok, itu menegaskan adanya ruang marginal di sisi lain. Berbeda dengan pandangan terhadap naratif dominan, Baudrillard membuka perspektif tentang kemungkinan bungkamnya massa pada naratif dominan. Baudrillard, (1983: 41) menyatakan bahwa munculnya kebuisan mayoritas harus terletak pada seluruh siklus sejarah perlawanan sosial, termasuk perlawanan terhadap keamanan dan informasi termasuk sejarah resmi.

Keheningan mayoritas yang dinyatakan Baudrillard secara khusus mengarah pada tindakan pembebasan. Dalam hal ini, Gross (1990: 11) menegaskan bahwa pembebasan dan inovasi harus dibeli dengan mengorbankan memori dan durasi. Demikian pula mitos yang menyentuh narasi publik, menurut Zayzafoon (2005:79) selalu berperan sebagai ancaman dan janji. Zayzafoon (2005: 83) menyatakan bahwa pembuatan mitos dan *remake*, baik dalam lembaran musik, novel, puisi, kanvas, dan manifesto feminis atau nasionalistik, selalu berasal dari posisi hegemonik.

Pemahaman terhadap narasi penting terkait dengan kerja memori dalam menangkap realitas untuk digunakan pada kepentingan tertentu. Terkait hal ini,

Ricoeur (2004: 448) menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyatukan rapuhnya identitas terbukti menjadi peluang manipulasi memori, terutama melalui ideologi. Menurut Ricoeur, penyalahgunaan memori secara otomatis bisa dianggap juga sebagai penyalahgunaan terhadap lupa. Ricoeur menempatkan narasi sebagai mediasi. Menurutnya, sebelum disalahgunakan, memori memiliki kegunaan, yaitu sifat selektif yang tidak dapat dihindari dalam memproduksi narasi. Jika seseorang tidak dapat mengingat semuanya, juga tidak dapat menceritakan semuanya, narasi tentu menawarkan pilihan dimensi. Ideologi memori dimungkinkan oleh variasi sumber yang ditawarkan oleh konfigurasi naratif dalam karya. Ricoeur menunjukkan bahaya utama narasi terletak pada penanganan sejarah yang sah, ditegaskan, dirayakan, dan diperingati dari sejarah resmi. Sumber daya naratif kemudian menjadi jebakan ketika kekuatan dominan mengambil alih dan memaksakan narasi kanonik melalui intimidasi, rayuan, atau sanjungan. Perampasan memori melibatkan sesuatu yang rahasia sehingga tindakan melupakan menjadi pengobatan semi-pasif, semi-aktif, seperti yang terlihat pada tindakan melupakan melalui penghindaran.

Dilema mengingat dan melupakan pada akhirnya harus dikaitkan dengan prinsip seleksi mnemonik. Brockmeier (2002: 22) menyatakan bahwa konsekuensi dari prinsip *mnemonic selection* adalah pemilihan informasi tertentu yang berarti menolak informasi lain, yaitu informasi yang dianggap tidak jelas, ditekan, atau dilupakan. Penataan ulang fragmen memori yang dipilih akan menjadi skema yang bermakna. Brockmeier (2002: 26–27) percaya bahwa narasi sangat penting di antara praktik memori ini karena narasi dapat memainkan beberapa peran yang berbeda

(kognitif, sosial, dan emotif) pada saat yang bersamaan. Narasi diartikulasikan dan disebarkan melalui register diskursif budaya yang tak terhitung jumlahnya: dari mitos dan dongeng hingga sastra, film, iklan, dan percakapan sehari-hari. Narasi juga memberikan historisitas yang melekatkan keberadaan manusia pada makna budaya.

Bagi Brockmeier (2002: 32) mengingat dan melupakan tidak hanya bergantung pada tindakan sejarah resmi atau keputusan individu. Mereka dinegosiasikan dalam interaksi antara organisasi sosial dan individu dari ingatan. Brockmeier (2002: 21–22). Melihat pengalaman sebagai bahan sumber untuk memori otobiografi mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana memori bekerja dalam mendongeng dan menceritakan diri sendiri.

Brockmeier menjelaskan hal ini dengan mengilustrasikan peran subjek individu yang dapat bertindak ganda: sebagai penulis dan sebagai editor dari ingatan penting terkait otoritas atas teks. Keduanya bersatu dalam tindakan memilih dan menunjukkan identitas. Menurutnya, diri yang mengingat 'diri redaksi' yang secara sadar atau tidak sadar memilih ingatan yang mampu melayani harga diri, kekuatan erotis, ketidakpedulian terhadap niat baik, dan kesenangan lainnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini dilakukan melalui metode diskursif. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan fenomena kesenyapan narasi kolonialisme. Fenomena tersebut akan dikonfirmasi dengan realitas faktual kolonialisme di Hindia Belanda, para penulis novel di bawah otoritas Balai Pustaka, dan pengalaman hidup masing-masing penulis terkait dengan pilihan

memori mereka yang diolah untuk membangun narasi pada masing-masing novelnya. Kelima novel yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini adalah (1) *Baruang ka nu Ngarora* (Ardiwinata, 1950), (2) *Mantri Jero* (Sastrahadiprawira, 1958), (3) *Pangeran Kornél* (Sastrahadiprawira, 2009), (4) *Burak Siluman* (Ambri, 2000), dan (5) *Lain Éta* (Ambri, 1983).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah sarana narasi, kekhususan ekspresi, proyeksi, dan konstruksi. Fokus kajian diarahkan pada cara mengingat/melupakan yang direpresentasikan melalui narasi dan proses penempatan ingatan, ekspresi ingatan, diri pengarang yang diproyeksikan ke dalam narasi, dan cara narasi disusun dalam perspektif estetis. (memberikan celah untuk diatasi pembaca) dan perspektif ideologis (menunjukkan ide dan kesadaran pada pilihan atas tindakan mensenyapkan narasi kolonialisme).

Fokus dan proses seleksi mnemonik tersebut dipetakan menjadi beberapa tipe: (1) pilihan memori mana yang dianggap paling mudah untuk membangun narasi (kolonialisme) dalam novelnya, (2) realitas kolonialisme mana yang dianggap sebagai bagian yang paling tidak menyenangkan sehingga tindakan melupakan adalah pilihannya, dan (3) peristiwa apa yang secara spontan ditanggapi oleh pengarang terkait kolonialisme meskipun hanya sebatas mengacu pada budaya kolonial dan sejenisnya. Secara teknis bagian-bagiannya ditunjukkan sebagai berikut:

1) perangkat naratif akan digunakan untuk menjawab bagaimana alat naratif (karakter, latar, plot) ditempatkan sebagai ruang untuk mengingat/melupakan. Proses analisis difokuskan pada strategi penempatan memori yang diadopsi

oleh penulis yang disajikan dalam narasi mereka

- 2) ekspresi khusus akan digunakan untuk menjejak ada atau tidak adanya narasi kolonialisme melalui (1) pilihan yang mudah dari ingatan-ingatan tertentu dari narasi kolonialisme, (2) ingatan perjalanan kolonialisme yang tidak menyenangkan, dan (3) reaksi spontan terhadap realitas yang paling dekat dengan kehidupan pengarang. Proses analisis difokuskan pada bentuk-bentuk kehadiran metafora, ekspresi, dan tanda-tanda khusus lainnya yang menunjukkan beroperasinya ingatan dan pelupaan dalam narasi.
- 3) Proyeksi digunakan untuk mengungkap kesadaran akan posisi pengarang terhadap karya dan realitas kolonialisme. Proses analisis diarahkan pada pemilihan ingatan yang disusun berdasarkan pertimbangan *positioning* pengarang terhadap karya dan realitas kolonialisme.
- 4) konstruksi digunakan untuk menunjukkan cara ingatan dibangun dalam narasi untuk tujuan estetika dan ideologis. Proses analisisnya dilakukan dengan mengkonfirmasi pada ingatan (individu/kolektif) yang menjadi narasi dalam kapasitas estetis (memberikan celah bagi pembaca untuk diatasi), ideologi (menunjukkan ide dan kesadaran tentang seleksi "diam" atas narasi kolonialisme), dan pragmatis (pemenuhan penerbitan, dll).

PEMBAHASAN

Narasi dan Upaya Mengingat

Kolonialisme sebagai realitas yang dihadapi pengarang (Ardiwinata, Méméd, Ambri) menjadi problematis

ketika dihadapkan pada tujuan krusial penciptaan karya mereka dengan persoalan bagaimana realitas itu dapat dicerna dan diolah dengan menghadirkan ingatan mereka melalui proses seleksi yang ketat. Reaksi kognitif mereka terhadap realitas kolonialisme dalam kasus ketiga pengarang yang dibesarkan oleh pendidikan Barat dan bekerja di pemerintahan akan tampak rumit terkait pemahaman, citra, ingatan, dan penalaran mereka dalam merangkai makna kolonialisme. Oleh karena itu, sangat penting untuk menelusuri reaksi ketiga pengarang dalam mengingat kolonialisme melalui (1) pilihan termudah untuk membangun narasi kolonialisme, (2) realitas tertentu dari kolonialisme yang dianggap paling tidak menyenangkan, dan (3) peristiwa-peristiwa kolonialisme mana saja yang direspons secara spontan.

Novel-novel mereka harus dilacak berdasarkan proses mengingat dan melupakan; Hal ini terkait dengan tindakan represi pers terhadap ekspresi penduduk pribumi serta kemungkinan adanya manipulasi memori. Pengaruh represi pers dan kontrol terhadap ekspresi budaya berdampak pada keragu-raguan ketiga pengarang dalam membaca kolonialisme sebagai kenyataan. Identitas pengarang sebagai pribumi yang tunduk pada otoritas pemerintah Hindia Belanda tentu berpeluang untuk manipulasi ingatan dengan menghindari ingatan atas kolonialisme atau menukar ingatan kolonialisme dengan ingatan yang lebih berorientasi pada kepentingan menciptakan ketertiban umum. Selain itu, manipulasi dilakukan dengan menempatkan alasan kesadaran posisi pengarang atas karya sebagai bentuk tanggung jawab, baik sebagai guru yang harus menunjukkan sikap intelektualnya maupun keluhuran keilmuannya, sebagai pribumi yang terikat pada otoritas tertinggi, dan posisi penulis yang

merupakan bagian dari staf Balai Pustaka yang terikat langsung dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kesadaran akan posisi pengarang menghasilkan narasi mengingat dengan beberapa permasalahan dilematis: perlu bersaksi atas kenyataan apa adanya atau memilih diam dan mengalihkannya ke memori publik tentang masa lalu yang masih terkait dengan masalah dominasi dan kekuasaan.

Namun, manipulasi memori adalah sesuatu yang masih bisa diterima dalam koridor novel sebagai karya imajinatif. Kesadaran membangun imajinasi berdasarkan realitas yang dihadapi pengarang memungkinkan adanya pertimbangan estetis di samping pertimbangan ideologis dan pragmatis.

Aturan tegas penguasa Hindia Belanda atas ekspresi pengarang pribumi (termasuk karya-karya imajinatif yang dihasilkan) tidak disambut oleh ketiga pengarang pribumi dengan memberikan kesaksian langsung atau mengkritik kolonialisme tetapi dengan memberdayakan imajinasinya untuk terus menjangkau wacana dominasi dan kekuasaan tanpa secara langsung menunjuk pada praktik kolonialismenya. Kelima novel Sunda terbitan Balai Pustaka, meski menjadi bagian dari karya kanonik, tentu saja sarana estetis di dalamnya telah dimanfaatkan secara optimal oleh ketiga pengarang ketika kepentingan ideologis (baca: menuntut hak pembebasan) dinilai sangat sulit untuk disuarakan dalam karya-karya mereka.

Meskipun tidak sepenuhnya apa yang diingat dan dilupakan berkaitan langsung dengan represi pemerintah Hindia Belanda terhadap ekspresi budaya kaum pribumi, seleksi mnemonik menyiratkan penolakan terhadap ingatan lain. Akan menjadi jelas ketika seleksi mnemonik mengambil bagian dalam kondisi ini. Prinsip seleksi mnemonik

dengan kondisinya dapat dipetakan menjadi tiga kondisi utama: (1) Ardiwinata, Méméd, dan Ambri sadar akan peristiwa yang harus ditekan atau dihilangkan dari ingatannya, (2) kondisi pertama menunjukkan bahwa ingatan yang dipilih dan ingatan yang dipendam atau bahkan terhapus dapat dimaknai sebagai pilihan berdasarkan kesadaran ideologis, dan (3) kondisi pertama dan kedua muncul dari kesadaran mereka akan peran novel dalam menyalurkan pemahaman, realitas, dan emosi. Ketiga pengarang tersebut secara historis terikat sebagai kaum pribumi yang berhadapan dengan dominasi dan kekuasaan kolonial maupun diri mereka sendiri yang mewarisi pengalaman masa lalu dari kehidupan tradisional yang juga tidak lepas dari warisan narasi masa lalu pendahulu mereka.

Tiga cara di mana penulis membangun narasi (perjuangan kelas, perebutan kekuasaan, dan kepercayaan mistis pada siluman) tidak sepenuhnya bersumber dari ingatan individu. Ada beberapa ingatan kolektif tentang tokoh-tokoh dalam kekuasaan tradisional, ingatan kolektif tentang tabu, dan ingatan kolektif tentang kelas dan norma sosial. Novel-novel mereka menunjukkan bagaimana memori bekerja melalui penyusunan narasi berdasarkan pengalaman masing-masing penulis dalam memahami realitas; novel didaktik (*Baruang ka nu Ngarora*), novel sejarah (*Mantri Jero* dan *Pangéran Kornél*), novel mistik tradisional (*Burak Siluman*), dan novel realis (*Lain Eta*). Dalam novel didaktiknya, Ardiwinata merepresentasikan pengalaman hidupnya sebagai orang terpelajar dan sebagai penduduk pribumi yang berhasil menembus pengakuan pemerintah Hindia Belanda atas prestasinya dalam pengajaran dan kebudayaan. Dengan novel-novel sejarah pra-kolonial dan sejarah kolonialnya, Méméd telah

mengkonstruksi karakter protagonis berdasarkan keluhuran warisan masa lalu dalam konteks pemerintahan tradisional. Adapun Ambri, dengan dua karyanya, tak lepas dari pengalaman mistik dan pengalaman-pengalaman modernnya.

Ketiga penulis telah bertindak sebagai subjek yang mengelola ingatan untuk penyusunan narasi karya-karyanya. Mereka mengambil otoritas dalam menentukan ingatan mana yang dapat mereka wujudkan untuk mematuhi aturan ketat Balai Pustaka agar karya mereka dapat diapresiasi oleh banyak orang. Suasana masa lalu dalam penceritaan kelima novel tersebut dihadirkan untuk dimaknai berdasarkan isi naratif terkait wacana perjuangan, wacana ancaman, dominasi, dan kekuasaan di samping masih adanya narasi tentang harga diri, nuansa mistis dan ketakutan atas tabu, kekuatan erotis, dan kegembiraan yang hadir mengisi sebagian bangunan narasi pada novel-novel tersebut.

Perpaduan antara memori individu dan memori publik menjadikan kelima novel memiliki potensi yang kuat dalam mengikat pemahaman, aktivitas, sosial, dan emosi pembacanya untuk mengkontekstualisasikan narasi yang dibacanya ke dalam pengalaman hidup masing-masing pembaca sehingga dapat terjadi pertukaran pemahaman. Implikasi utamanya adalah ingatan terkait dengan persoalan kesetiaan pada narasi resmi yang dibangun oleh pihak-pihak otoritatif (kolonial) atau bertahan dengan narasi yang telah dibangun dan diwariskan begitu lama dan berakar pada kesadaran kolektif. Memori kolektif ketiga pengarang tersebut dapat mengambil peran untuk menceritakan kehidupan masa lalu di ruang publik dalam konteks kekinian (masa di mana ketiga pengarang hidup) meskipun selalu ada narasi dominan dari pemegang *status quo* melalui praktik hegemonik, seperti apa

yang telah Balai Pustaka susun narasinya untuk dikonsumsi masyarakat.

Kesenyanan: Proyeksi dan Konstruksi Narasi Kolonialisme

Lima novel Sunda dalam tradisi Balai Pustaka meninggalkan jejak kolonialisme melalui cara narasi dikonstruksi dan disajikan. Hal tersebut lebih mengarah pada cara pengarang memilih ingatan tentang kolonialisme yang dibangun melalui proyeksi dan imajinasi. Proyeksi menunjukkan bagaimana pengarang menempatkan dirinya dalam wacana yang dibangunnya dalam sebuah novel; imajinasi sebagai alat yang digunakan dalam mengelola ingatan untuk sampai pada kebutuhan menangkap realitas kolonialisme.

Karena ketiga pengarang tersebut merupakan insan intelektual yang lahir dari didikan Barat (Belanda), novel-novel mereka merupakan representasi intelektual mereka. *Baruang ka nu Ngarora* menunjukkan bagaimana D.K. Ardiwinata tidak hanya berkesadaran tentang “kelas” tetapi juga wacana kemajuan yang dibawa dari cara berpikir Barat digunakan Ardiwinata untuk mengkritisi perangai buruk, kebodohan, dan kemalasan kaum pribumi kelas menengah dan bawah. Nasihat Haji Abdul Raup kepada putrinya: Nyi Rapih (Ardiwinata, 1950: 49–50) secara tegas menunjukkan pemahaman Ardiwinata terkait ‘racun’ (perangai buruk, kemalasan, dan kebodohan) yang dianggap berbahaya bagi muda-mudi.

Mantri Jero dan *Pangéran Kornél* menunjukkan bagaimana Méméd sebagai kaum *ménak* berkesadaran akan akar historis terkait leluhur yang telah memberi garis keturunan yang harus dijaga kemurniannya sekaligus beradaptasi terhadap perubahan sosial akibat kolonialisasi. Dalam *Mantri Jero* Méméd menarasikan sosok Den Yogaswara sebagai elite tradisional yang

menjabat sebagai Mantri Jero dengan segala tanggung jawabnya terkait urusan internal Nagara Tengah di Priangan Timur (Sastrahadiprawira, 1958: 52–60). Melalui pengetahuan sejarah lokal terkait pengausaan Mataram atas Tanah Priangan, Méméd menarasikan perjuangan Den Yogaswara dalam menghadapi berbagai kecamuk perebutan kekuasaan, ketidakadilan, dan kekejian.

Adapun dalam *Pangéran Kornél* Méméd menunjukkan kesadarannya terkait pengaruh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dalam memetakan atau memilih pemimpin pribumi pada pemerintah lokal, termasuk pemerintahan di wilayah Sumedang (Sastrahadiprawira, 2009: 101–104). Namun demikian, Méméd lebih memilih menarasikan konflik internal yang dihadapi para elite pemerintah tradisional, terutama yang dihadapi oleh Pangéran Kusuma Dinata (Pangeran Kornél). Elite pemerintah Hindia Belanda dalam novel tersebut dikisahkan hanya sebatas memberi pengawasan terhadap kinerja para pemimpin tradisional (Sastrahadiprawira, 2009: 14, 112, 125).

Lain Éta dan *Burak Siluman* menunjukkan kemampuan Ambri dalam mengemas gagasan-gagasan realisme Barat yang melarut dalam wacana-wacana tradisional kaum pribumi. Dalam *Lain Éta*, tokoh bernama Mahmud yang berpendidikan Barat dihadirkan Ambri sebagai sosok penyeimbang pemikiran feodal yang melekat kuat pada tokoh bernama Juragan Kalipah. Pemikiran-pemikiran Juragan Téja menegasi pemikiran Juragan Kalipah terkait kemurnian kelas (Ambri, 1983: 49–57). Dalam novel tersebut Ambri memilih untuk meluluskan kemurnian kelas dalam ikatan pernikahan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga mereka digagalkan melalui sikap tidak setia Nyi Éha (Ambri, 1983: 77–97).

Dalam *Burak Siluman* Ambri memanfaatkan isu tabu terkait pengantin wanita yang harus mengalami kutukan dari raja siluman sampai harus mati gentayangan dan meninggalkan anak sebagai *burak* (sosok manusia berkaki kuda) yang siap mengganggu kehidupan wanita (Ambri, 2000: 62–66). Dalam novel tersebut Ambri memilih menarasikan kepercayaan tradisional terkait ketabuan dan sosok *burak* meski di bagian akhir cerita Ambri memberi pertimbangan agar tidak terlalu cepat percaya akan kabar yang didengar terkait kisah-kisah mistis (Ambri, 2000:66).

Novel-novel mereka cukup jelas menunjukkan bagaimana pengarang memasuki dan menerima peradaban modern, juga menggunakan realitas modern sebagai metode untuk memaknai pembebasan, meskipun masih dalam kapasitas yang terbatas. Dalam konteks yang menggejala di berbagai negara sebagai akibat dari merebaknya modernitas, ketiga sastrawan Sunda tersebut merupakan bagian dari kelas menengah yang sedang berjuang menghadapi perubahan sosial dari masa menjelang persiapan Perang Dunia I, atau menghadapi Perang Dunia II.

Namun, kelima novel tersebut tampaknya menempati ruang tersendiri yang tidak diganggu oleh kecamuk realitas. Sebut saja *Baruang ka nu Ngarora* (1914) yang pada saat diterbitkannya merupakan masa di mana dunia sedang menghadapi awal Perang Dunia I. Sebagaimana ditunjukkan oleh Dijk (2007: 147) yang menyatakan bahwa reaksi masyarakat Eropa terhadap berita perang semakin parah. Kecemasan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Di seluruh nusantara orang menelepon redaktur surat kabar, pegawai negeri sipil, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait banyaknya rumor yang beredar

dan mencari tahu apa yang terjadi di koloni dan Eropa.

Novel yang mensenyapkan narasi kolonialisme relevan dengan masa represif yang harus dihadapi para pengarangnya. Namun, kesenyapan lima novel dari narasi kolonialisme perlu ditempatkan dalam arti yang ditunjukkan Paul Bijl. Bijl (2012: 447) menyatakan bahwa kita tidak boleh meremehkan diam dan mengartikan diam sebagai tidak ada. (Bijl, 2012) mengatakan bahwa diam tidak harus merupakan upaya untuk melupakan tetapi terletak pada masalah ketersediaan bahasa; kemungkinan kurangnya bahasa dapat menghalangi produksi yang mudah diingat.

Pada kelima novel tersebut narasi kolonialisme dihapus dan dialihkan ke narasi lokal tentang etika kekuatan lokal, ketimpangan kelas, dan bahkan wacana mistik. Narasi-narasi lokal ini diselimuti wacana mistis terkait sosok pahlawan, superioritas orang tua dengan kapasitas keyakinannya, bahkan mitos dunia gaib yang bisa ditembus oleh orang-orang terpilih. Tentu saja, kehadiran wacana mistis tidak dalam kondisi netral melainkan berpihak pada kepentingan tertentu.

Dalam hal ini, penyelarasan kelima novel terhadap narasi lokal yang diselimuti wacana mistis menunjukkan fungsi novel dalam konteks sosial, yaitu sebagai alat untuk menyajikan fakta-fakta otoritas kelas *ménak* yang memiliki keluhuran dan berbagai perspektif kemurniannya (*Baruang ka nu Ngarora*), perjuangan mengembalikan tahta dan kehormatan sebagai elite tradisional (*Mantri Jero* dan *Pangéran Kornél*), alam gaib yang menjanjikan kemakmuran sekaligus ancaman bagi pelanggar kesepakatan (*Burak Siluman*), dan negosiasi dan perebutan keyakinan atas nama cinta, kelas, dan agama (*Lain Éta*).

Dalam *Baruang ka nu Ngarora*, keberpihakan Ardiwinata terhadap kaum

ménak (bangsawan) akan memperkuat makna marginalisasi kelas-kelas lain dalam budaya feodal. Begitu pula dengan *Mantri Jero* dan *Pangéran Kornél*, meski takhta dan kehormatan adalah pengejaran mereka, Méméd mengembalikan takhta dan kehormatan kepada pemiliknya yang “sejati”, yaitu orang-orang terpilih dalam hak silsilahnya. Di *Burak Siluman*, Ambri melabeli harapan kemakmuran dan ketakutan akan kutukan pada rakyat jelata yang memiliki akar kuat dalam kepercayaan mistis. Dalam kondisi ini, rakyat jelata terpinggirkan dari konteks rasional Barat. Adapun *Lain Éta*, pada akhirnya, Ambri harus berpihak pada keyakinan agama meskipun keyakinan kelas dan keyakinan rasional modern masih membayangi keseluruhan narasi.

Ingatan para pengarang yang diproyeksikan ke dalam narasi-narasi dalam kelima novel tersebut secara bervariasi menunjukkan kesenyapan narasi yang berbeda karena ingatan mereka tentang realitas kolonialisme bekerja secara berbeda sehingga “volume suara” mereka pun berbeda meskipun dalam nada yang hampir sama. Perbedaan cara masing-masing memori beroperasi pada realitas kolonialisme ditunjukkan melalui (1) kehadiran metafora (terutama mengenai takdir, kekuasaan, dan perjuangannya) yang cukup dominan dalam *Mantri Jero* dan *Pangéran Kornél*, (2) transfer dan penggantian ingatan masa kini (masa realitas/kehidupan kolonial yang sebenarnya) menjadi ingatan masa lalu yang melampaui batas-batas fisik seperti yang ditunjukkan melalui *Burak Siluman*, dan (3) di *Lain Éta*, realitas faktual perlunya menjaga kemurnian kelas secara tegas tertanam dalam seluruh narasi meskipun dinegosiasikan dengan perspektif agama tentang kesetaraan posisi dan pandangan modern tentang pendidikan yang memungkinkan bisa mengambil alih realitas itu.

Pada gejala kesenyapan narasi, narasi kelima novel dikonstruksi melalui (1) ingatan atas kolonialisme dinegasikan dengan ingatan masa lalu dalam kehidupan dan kepercayaan tradisional (dipresentasikan oleh *Baruang ka nu Ngarora*, *Mantri Jero*, *Pangéran Kornél*, dan *Burak Siluman*), (2) wacana dominasi dan kekuasaan disandingkan dengan wacana tentang kesetaraan dan implikasinya (direpresentasikan dalam novel *Mantri Jero*, *Pangéran Kornél*, dan *Lain Éta*), dan (3) wacana otoritatif (kolonial) tidak ditanggapi secara langsung tetapi digunakan sebagai gambaran kecil terkait pemerintahan tradisional yang berada di bawah kekuasaan Kompeni dan pemerintah Hindia Belanda (dipresentasikan dalam *Pangéran Kornél*).

PENUTUP

Kelima novel yang dijadikan sampel penelitian ini menunjukkan bahwa narasi kolonialisme diredam dan dialihkan ke narasi lokal terkait perjuangan kelas, perebutan kekuasaan, dan kepercayaan mistis. Pengalihan yang dimaksud adalah tanda-tanda utama yang berpusat pada masalah dominasi dan kekuasaan. Narasi-narasinya dibangun berdasarkan kesiapan masing-masing pengarang dalam memilih dan menata ingatan agar tidak terpelewat dalam pembahasan yang tegas tentang kolonialisme. Dalam *Baruang ka nu Ngarora*, Ardiwinata menekankan kesadarannya akan kelas sebagai fakta yang tidak bisa diganti dan harus diterima. Suara-suara yang terdengar dalam narasi lebih banyak bersumber dari suara penguasa yang dominan (feodal). Suara-suara dominan lainnya (kolonial) dapat dibaca juga sebagai suara-suara yang ditutup dengan suara-suara dominan feodal untuk pertimbangan pragmatis.

Dalam *Mantri Jero*, Méméd Sastrahadiprawira telah menjauhkan

narasi yang dibangunnya dari wacana kolonialisme. Kekacauan kehidupan pra-kolonial yang diriwayatkan oleh Méméd pada akhirnya menghasilkan medan arsirani dari dua kubu narasi yang telah ia susun: dominasi dan kekuasaan tradisional dengan terbatasnya penampilan patron penguasa yang beroperasi di pemerintahan lokal di Priangan. Bidang arsirani yang dimaksud adalah ko-eksistensi narasi pra-kolonial dan kolonial yang menekankan ingatan akan kekuasaan tradisional yang menjadi tumpuan informasi kehadiran kolonial dengan segala praktik kolonialnya yang harus disembunyikan. *Pangeran Kornél* digunakan Méméd untuk merebut dan menjaga wacana kemurnian garis keturunan penguasa lokal di wilayah Sumedang. Méméd secara tidak langsung telah menghadirkan kekuatan kolonial yang mensubordinasi kekuatan tradisional (bupati, dll.) yang ditunjukkan melalui narasi terkait pengawasan, pengaturan, dan gejolak penguasa lokal.

Sedikit berbeda dari keempat novel lainnya, *Burak Siluman* mengedepankan isu-isu mistis yang berakar pada ingatan kolektif tradisional. *Burak Siluman* merupakan indikasi ingatan yang telah diredam oleh penguasa Hindia Belanda. Pemilihan subjek mistik juga menunjukkan adanya wacana pemarginalan karena akhir narasi *Burak Siluman* ditekan melalui interogasi rasional terhadap keyakinan masyarakat atas siluman. Tentu saja, interogasi tersebut dibawa dari pemikiran Barat terkait wacana metafisik. Untuk pemilihan penarikan naratif ke dalam wacana rasional, Ambri telah membangun *Burak Siluman* dengan menggunakan memori kolektif tradisional yang dinarasikan dengan lantang kemudian dibungkam melalui kontrol rasional penguasa Hindia Belanda. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa kaum pribumi telah

tersubordinasi karena tidak mampu melepaskan kepercayaannya terhadap kehidupan mistisnya.

Lain Eta membahas konflik dan negosiasi atas isu keyakinan kelas dan isu keyakinan agama yang disajikan dalam latar perkotaan selama masa kolonial. Cara naratif yang dibangun adalah melalui konflik yang cukup berimbang dan pemberian posisi yang sepadan dari subjek-subjek di dalamnya dalam kapasitas merundingkan keyakinan satu sama lain meskipun pada akhirnya narasi rasionalitas yang dibawa oleh Mahmud (seorang tokoh terpelajar) harus disamakan dalam dominasi narasi kepercayaan kelas dan agama.

Kelima novel tersebut menampilkan berbagai pilihan ingatan tentang realitas kolonialisme: (1) ingatan atas kolonialisme telah ditekan, kemudian latar kolonial dihadirkan sebagai alat naratif untuk berbicara tentang kelas dan mistik tradisional, (2) ingatan atas kolonialisme dihadirkan bersama dengan ingatan lain terkait dominasi dan kekuasaan sebagai celah dan ruang kosong yang harus diatasi pembaca, dan (3) ingatan atas kolonialisme dihilangkan dalam narasi.

Hasil seleksi ingatan pengarang diekspresikan dalam novel-novelnya melalui pilihan narasi. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang mudah dan dianggap aman untuk memotret realitas sosial (keluarga, cinta, konflik kelas). Ingatan yang dianggap sebagai kenangan yang tidak menyenangkan terkait kolonialisme (penindasan, rasisme, perbudakan, dll.) dihapus atau setidaknya ditekan kuat. Reaksi spontan terhadap kenyataan (aman) dikemas dalam narasi yang paling dekat dengan kehidupan yang sedang dijalani pengarang: kegembiraan dan peruntungan dalam keyakinan tradisional dan budaya kolonial dijadikan gagasan yang memperkuat posisi masing-masing dalam

bingkai kolonial, atau khususnya dalam tradisi Balai Pustaka. Penempatan ini berimplikasi pada pengoperasian instrumen proyeksi. Pilihan memori disusun berdasarkan pertimbangan *positioning* pengarang terhadap karya dan realitas kolonialisme.

Terlihat bagaimana Ardiwinata, Méméd, dan Ambri sama-sama memosisikan diri terkait status: (1) sebagai guru (ikon teladan dan keluhuran ilmu pengetahuan dan budaya), (2) sebagai pribumi (berkaitan dengan hubungan hierarkis mereka dengan pihak otoritatif Hindia Belanda), dan sebagai pegawai Balai Pustaka (partisipasi pengendalian pers). Dengan demikian, *positioning-positioning* tersebut memiliki potensi sebagai alat atau motif penting bagi konstruksi naratif yang disusun untuk kepentingan estetis, ideologis, dan pragmatis. Kapasitas estetika memberikan celah bagi pembaca untuk diatasi melalui pemberdayaan repertoar tentang masa lalu, ingatan kolektif, dan kolonialisme. Ideologi berfungsi sebagai penunjuk gagasan dan kesadaran tentang pilihan "diam" atas narasi kolonialisme. Pragmatisme lebih mengacu pada tujuan praktis penciptaan novel yang tidak jauh dari kepentingan pemenuhan publikasi berdasarkan tuntutan Balai Pustaka dan pemenuhan jangkauan ruang publik berdasarkan kemampuan intelektual yang dimiliki masing-masing pengarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman; E., Edi, S., Sastrawijaya, M., & Rochaeti, E. (1984). *Biografi dan karya sastrawan Muhamad Ambri*. Laporan Penelitian. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
- Ambri, M. (1983). *Lain eta*. Bandung: Rahmat Cijulang.
- _____. (2000). *Burak siluman*. Bandung: Rahmat Cijulang.
- Ardiwinata, D. (1950). *Baruang ka nu Ngarora*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bartlett, F. C. (1995). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baudrillard, J. (1983). In the shadow of the silent majorities. In *the Shadow of the Silent Majorities ... or The End of The Social and Other Essays*. Semiotext(e), Inc. & Columbia University.
- Bijl, P. (2012). Colonial memory and forgetting in the Netherlands and Indonesia. *Journal of Genocide Research*, 14(3-4), 441-461. <https://doi.org/10.1080/14623528.2012.719375>
- Brockmeier, J. (2002). Remembering and Forgetting: Narrative as Cultural Memory. *Culture Psychology*, 8(1), 15-43. <https://doi.org/10.1177/1354067X0281002>
- Casutto, Is. H. & Soeprapto, R. M. (1931). *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. G. C. T. van Dorp & Co. n. v.
- Deenik, A.C; Zandvoort, G.H.H; Sadikin, R. (1929). *Gedankboek: MOSVIA 1879-1929*. N.V. Mij. Vorkink.
- Dijk, K. van. (2007). *The Netherlands Indies and The great war 1914-1918*. Leiden: KITLV Press.
- Eglitis, Daina S. & Kelso, M. (2018). Ghost heroes: Forgetting and Remembering in National Narratives of the Past. *Acta Sociologica*, XX(X), 1-14. <https://doi.org/10.1177/0001699318806340>
- Gross, D. (1990). Critical synthesis on urban knowledge: Remembering and forgetting in the modern city. *Social Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy*, 4(1), 3-22.

- <https://doi.org/10.1080/02691729008578553>
- Ricoeur, P. (2004). *Memory, hisstory, forgetting*. Chocago: The University of Chicago Press.
- Rosidi, A. (1996). *Pancakaki*. Bandung: Girimukti Pasaka.
- Sastrahadiprawira, R. M. (1958). *Mantri Jero*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sastrahadiprawira, R. M. (2009). *Pangeran Kornel*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Wertsch, J. V. (2004). *Voices of collective Remembering*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yamamoto, N. (2011). *Print power and censorship in Colonial Indonesia, 1914–1942*. The Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Yetty Kusmiyati, H. (1979). *Raden Memed Sastrahadiprawira*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zayzafoon, L. B. Y. (2005). The violence of remembering and forgetting: Gender, nation and narration in the aesthetic reception of Dido/Elissa. *International Journal of Francophone Studies*, 8(1).
<https://doi.org/10.1386/ijfs.8.1.71/1>